

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan pesatnya perkembangan angkutan laut di Indonesia, peran pengendalian risiko kecelakaan kerja semakin dirasakan penting. Namun, kenyataannya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) masih sering diabaikan. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya angka kecelakaan kerja yang masih terjadi. Menurut (Ilham et al., 2023) Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan bagian integral dari upaya perlindungan tenaga kerja. Terutama dalam industri angkutan laut, SMK3 berperan penting dalam mengurangi risiko-risiko seperti kerugian moral dan material, kehilangan jam kerja, serta dalam menjaga keselamatan manusia dan lingkungan sekitar (Susanti *et al.*, 2019). Implementasi SMK3 di sektor angkutan laut mendukung peningkatan kinerja secara efektif dan efisien dalam proses bongkar / muat.

Keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan atau penyakit yang timbul akibat pekerjaan (Mudjimu *et al.*, 2019). Tenaga kerja dianggap sebagai aset berharga bagi perusahaan dan merupakan elemen kunci dalam proses produksi, bersama dengan unsur-unsur lainnya (Priyono & Harianto, 2020). Penerapan K3 akan menciptakan lingkungan kerja yang baik bagi karyawan. Namun, perusahaan tidak bisa menerapkan K3 tanpa adanya kesadaran individu masing-masing. Cara mendukung keselamatan dan keamanan operasional yang andal, diperlukan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Ini mencakup segala aktivitas yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi keselamatan serta kesehatan pekerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan (Priyono & Harianto, 2020).

Kinerja keselamatan merupakan aspek penting dalam setiap organisasi atau perusahaan. Analisis proses dan prosedur keselamatan dilakukan untuk menilai efektivitas sistem yang telah diterapkan (Kautsar *et al.*, 2013). Proses ini melibatkan

beberapa tahapan krusial, yaitu penilaian tingkat risiko, identifikasi potensi bahaya, evaluasi kebijakan dan peraturan keselamatan, serta investigasi kecelakaan yang mungkin pernah terjadi. Penilaian tingkat risiko dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengukur potensi bahaya yang ada di lingkungan kerja. Hal ini melibatkan analisis menyeluruh terhadap peralatan, bahan, dan prosedur yang digunakan. Identifikasi potensi bahaya juga penting untuk mengenali situasi atau kondisi yang dapat menyebabkan kecelakaan atau insiden (Yenni *et al.*, 2019). Informasi ini kemudian digunakan untuk mengembangkan langkah-langkah pencegahan yang efektif. Evaluasi kebijakan dan peraturan keselamatan dilakukan untuk memastikan bahwa pedoman yang ada telah sesuai dengan standar industri dan memenuhi persyaratan hukum. Tinjauan berkala terhadap kebijakan dan peraturan ini membantu organisasi untuk tetap *up-to-date* dengan perkembangan terbaru dalam praktik keselamatan dan mengatasi celah yang mungkin ada (Erdin *et al.*, 2023).

Investigasi kecelakaan merupakan bagian penting dari kinerja keselamatan. Setiap insiden atau kecelakaan harus diselidiki secara menyeluruh untuk mengidentifikasi penyebab utama dan faktor-faktor yang berkontribusi (Amansyah & Putra, 2024). Temuan dari investigasi ini digunakan untuk mengembangkan rekomendasi dan tindakan korektif guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Tujuan utama dari kinerja keselamatan adalah untuk mengurangi kecelakaan dan insiden di tempat kerja (Kautsar *et al.*, 2013). Dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang efektif, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman bagi karyawan. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan dan kesejahteraan pekerja, tetapi juga dapat meningkatkan moral dan produktivitas mereka. Selain itu, kinerja keselamatan yang baik juga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi secara keseluruhan. Dengan mengurangi jumlah kecelakaan dan insiden, organisasi dapat menghemat waktu, energi, dan sumber daya yang diperlukan untuk menangani konsekuensi dari kejadian tersebut (Kautsar *et al.*, 2013). Pemeriksaan sistem yang ada, diagnosis masalah keselamatan, dan pemberian solusi yang tepat dapat membantu organisasi untuk mengoptimalkan operasi mereka dan mencapai tujuan bisnis dengan lebih efektif. Dalam penerapannya, kinerja keselamatan memerlukan komitmen dan

keterlibatan dari seluruh anggota organisasi, mulai dari manajemen puncak hingga karyawan lini depan. Budaya keselamatan yang kuat, di mana setiap orang merasa bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain, sangat penting untuk keberhasilan program keselamatan. Pelatihan rutin, komunikasi terbuka, dan perbaikan terus-menerus adalah kunci untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja keselamatan dari waktu ke waktu (Dihartawan, 2018).

Perusahaan Bongkar Muat (PBM) merupakan badan hukum yang memiliki peran penting dalam rantai logistik di Indonesia. Perusahaan ini didirikan secara khusus untuk mengelola dan menjalankan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal di Pelabuhan (Suryantoro *et al.*, 2020). PBM bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses bongkar muat dilakukan secara efisien, aman, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam menjalankan kegiatannya, PBM mengandalkan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang terdaftar di pelabuhan setempat. TKBM adalah pekerja yang secara khusus bertugas untuk melaksanakan pekerjaan bongkar muat di Pelabuhan (Suryantoro *et al.*, 2020). Mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menangani berbagai jenis kargo, mulai dari barang umum hingga barang berbahaya. TKBM bekerja di bawah pengawasan dan koordinasi PBM. Mereka harus mengikuti prosedur keselamatan yang ketat dan menggunakan peralatan pelindung diri yang sesuai untuk meminimalkan risiko kecelakaan kerja. PBM bertanggung jawab untuk menyediakan pelatihan dan sertifikasi yang diperlukan bagi TKBM, serta memastikan bahwa mereka bekerja sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku.

Penyedia jasa bongkar muat, seperti PBM, melaksanakan tiga kegiatan utama dalam proses bongkar muat, yaitu *stevedoring*, *cargodoring*, dan *receiving/delivery* (Sakinah, 2019). *Stevedoring* meliputi kegiatan membongkar atau memuat barang dari atau ke kapal dengan menggunakan *crane* atau peralatan bongkar muat lainnya. *Cargodoring* mencakup kegiatan memindahkan barang dari dermaga ke gudang atau lapangan penumpukan, atau sebaliknya. *Receiving/delivery* melibatkan kegiatan menerima atau menyerahkan barang kepada pemilik atau agen yang berwenang. Untuk melaksanakan kegiatan bongkar

muat ini, PBM dilengkapi dengan berbagai peralatan dan infrastruktur yang diperlukan. Peralatan ini dapat mencakup *crane*, *forklift*, *conveyor belt*, dan perlengkapan khusus lainnya yang disesuaikan dengan jenis kargo yang ditangani (Rusmiyanto & Alit Sumardiatna, 2021).

PBM juga harus memiliki gudang atau lapangan penumpukan yang memadai untuk menyimpan barang sementara sebelum atau setelah proses bongkar muat. Selain peralatan dan infrastruktur, PBM juga harus memiliki sistem manajemen yang efektif untuk mengkoordinasikan kegiatan bongkar muat. Hal ini melibatkan perencanaan yang cermat, alokasi sumber daya yang efisien, dan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak yang terlibat, seperti perusahaan pelayaran, pemilik barang, dan otoritas pelabuhan. Keberadaan PBM dan TKBM sangat penting untuk memastikan kelancaran arus barang di pelabuhan Indonesia. Dengan menjalankan kegiatan bongkar muat secara profesional dan efisien, mereka berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional dan memfasilitasi perdagangan internasional. Namun, penting juga bagi PBM untuk terus meningkatkan kualitas layanan mereka, mengadopsi teknologi terbaru, dan memprioritaskan keselamatan kerja untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing industri kepelabuhanan di Indonesia (Gultom *et al.*, 2022).

Keselamatan kerja merupakan aspek fundamental dalam setiap industri, termasuk sektor bongkar muat (Priyono & Harianto, 2020). Di Indonesia, penerapan keselamatan kerja diatur dalam beberapa undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi perusahaan dan pekerja. Peraturan pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja menetapkan kerangka kerja untuk mengimplementasikan sistem manajemen yang efektif guna menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja (Yuliansyah & Arneta, 2020). Undang-undang ini mewajibkan perusahaan untuk mengidentifikasi bahaya, menilai risiko, dan menerapkan langkah-langkah pengendalian yang diperlukan untuk meminimalkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Selain itu, Undang-Undang Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja mengatur aspek-aspek yang berkaitan dengan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan pekerja. Undang-undang ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang

sehat, menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai, dan melakukan pemantauan kesehatan secara berkala bagi pekerja. Dengan memprioritaskan kesehatan kerja, perusahaan dapat memastikan bahwa pekerja mereka dalam kondisi fisik dan mental yang optimal untuk melakukan pekerjaan dengan aman dan efisien. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2015 tentang Ketenagakerjaan juga memainkan peran penting dalam menjamin keselamatan kerja. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban pekerja serta tanggung jawab perusahaan dalam menyediakan lingkungan kerja yang aman. Perusahaan diwajibkan untuk menyediakan peralatan keselamatan yang diperlukan, memberikan pelatihan keselamatan kerja, dan memastikan bahwa pekerja mematuhi prosedur keselamatan yang ditetapkan (Yuliansyah & Arneta, 2020).

Meskipun dasar hukum telah ditetapkan, penerapan keselamatan kerja di lapangan masih menghadapi tantangan. Banyak pekerja yang hanya fokus pada pemenuhan kewajiban sesuai dengan tanggung jawab mereka, tanpa memperhatikan keselamatan orang lain, lingkungan sekitar, dan bahkan diri mereka sendiri. Sikap ini dapat meningkatkan risiko kecelakaan kerja dan menimbulkan kekhawatiran bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam proses bongkar muat, penggunaan alat keselamatan menjadi sangat penting. Alat-alat seperti helm, sepatu keselamatan, sarung tangan, dan rompi reflektif berfungsi untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja (Akbar *et al.*, 2022). Peralatan bongkar muat juga harus dirawat dengan baik dan dioperasikan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan untuk mencegah kecelakaan. Namun, keselamatan kerja bukan hanya tanggung jawab pekerja secara individual. Perusahaan juga memiliki peran krusial dalam menciptakan budaya keselamatan yang kuat. Manajemen harus menunjukkan komitmen yang jelas terhadap keselamatan kerja, menyediakan sumber daya yang diperlukan, dan secara aktif melibatkan pekerja dalam pengembangan dan implementasi program keselamatan. Komunikasi reguler, pelatihan berkala, dan pengawasan yang ketat adalah kunci untuk menjaga standar keselamatan yang tinggi. Selain itu, kerja sama antara perusahaan, serikat pekerja, dan pemerintah juga diperlukan untuk meningkatkan keselamatan kerja di sektor bongkar muat. Pertukaran informasi, praktik terbaik, dan pengalaman dapat membantu

mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan mengembangkan solusi yang efektif. Dengan upaya bersama dan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat, keselamatan kerja dapat ditingkatkan secara signifikan, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan produktif bagi semua. resiko kecelakaan kerja yang di timbulkan dari kegiatan bongkar muat (Amansyah & Putra, 2024).

PT PBM Alam Sejati Semarang adalah perusahaan yang berperan penting dalam rantai logistik di Semarang, dengan fokus utama pada penyediaan jasa bongkar muat. Perusahaan ini menangani berbagai jenis kargo, termasuk batu bara, minyak, dan *coil*, yang merupakan komoditas penting dalam industry dan perdagangan. Sebagai penyedia jasa bongkar muat, PT PBM Alam Sejati Semarang melakukan tiga kegiatan utama: *stevedoring*, *cargodoring*, dan *receiving/delivery*. *stevedoring* melibatkan proses pemuatan atau pembongkaran barang dari atau ke kapal dengan menggunakan peralatan bongkar muat yang sesuai. *cargodoring* mencakup pemindahan barang dari dermaga ke gudang atau lapangan penumpukan, atau sebaliknya. Sementara itu, *receiving/delivery* meliputi kegiatan menerima atau menyerahkan barang kepada pemilik atau pihak yang berwenang. Untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat, PT PBM Alam Sejati Semarang mengandalkan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang terampil dan berpengalaman.

TKBM memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa proses bongkar muat dilakukan secara efisien, aman, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Mereka bekerja di bawah pengawasan dan koordinasi perusahaan, mengikuti prosedur operasi standar (SOP) yang telah ditetapkan. Keselamatan kerja menjadi prioritas utama bagi PT PBM Alam Sejati Semarang dalam menjalankan kegiatannya. Perusahaan ini menekankan pentingnya penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi semua TKBM yang terlibat dalam proses bongkar muat (Wirdayani, 2023). APD, seperti helm keselamatan, sepatu keselamatan, sarung tangan, dan rompi reflektif, berfungsi untuk melindungi pekerja dari potensi bahaya dan meminimalkan risiko kecelakaan kerja. Selain menyediakan APD, PT PBM Alam Sejati Semarang juga memastikan bahwa TKBM memahami dan mematuhi

SOP yang telah ditetapkan. SOP ini mencakup langkah-langkah keselamatan, prosedur pengoperasian peralatan, dan protokol untuk menangani situasi darurat. Dengan mengikuti SOP secara konsisten, TKBM dapat bekerja dengan lebih aman dan efisien, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan atau insiden. Pelatihan dan pendidikan juga menjadi bagian integral dari upaya PT PBM Alam Sejati Semarang dalam meningkatkan keselamatan kerja. Perusahaan ini memberikan pelatihan rutin kepada TKBM tentang praktik keselamatan, penggunaan peralatan yang benar, dan respons terhadap situasi darurat. Dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan TKBM, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan produktif. Selain fokus pada keselamatan kerja, PT PBM Alam Sejati Semarang juga berupaya untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan. Perusahaan ini berinvestasi dalam peralatan dan teknologi modern untuk memastikan bahwa proses bongkar muat dilakukan secara optimal. Sistem manajemen yang efektif, termasuk perencanaan yang cermat, alokasi sumber daya yang efisien, dan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak yang terlibat, juga diterapkan untuk memastikan kelancaran operasi. Dengan komitmen yang kuat terhadap keselamatan kerja, efisiensi operasional, dan kualitas layanan, PT PBM Alam Sejati Semarang berusaha untuk menjadi mitra terpercaya bagi pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan ini terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi regional dan nasional melalui perannya dalam rantai logistik di Semarang dan sekitarnya.

Meskipun PT PBM Alam Sejati Semarang telah menetapkan kebijakan dan prosedur keselamatan kerja yang komprehensif, termasuk penggunaan wajib Alat Pelindung Diri (APD), masih terdapat tantangan dalam penerapannya. Salah satu masalah yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran di antara karyawan tentang pentingnya menggunakan APD di lingkungan kerja. Penggunaan APD, seperti helm keselamatan, sepatu keselamatan, sarung tangan, dan rompi reflektif, sangat penting untuk melindungi karyawan dari potensi bahaya dan meminimalkan risiko kecelakaan kerja. Namun, banyak karyawan yang mengabaikan atau tidak konsisten dalam menggunakan APD, mungkin karena ketidaknyamanan, kelalaian, atau

kurangnya pemahaman tentang konsekuensi dari tidak menggunakan APD. Kurangnya kesadaran ini dapat menimbulkan risiko keselamatan yang signifikan, tidak hanya bagi karyawan yang bersangkutan, tetapi juga bagi rekan kerja dan lingkungan kerja secara keseluruhan. Kecelakaan kerja yang disebabkan oleh tidak digunakannya APD dapat mengakibatkan cedera serius, kehilangan waktu kerja, dan kematian atau terjadinya kehilangan nyawa, kasus kehilangan nyawa pada kegiatan operasional pbm alam sejatisemarang terjadi pada bulan desember tahun 2023. Kecelakaan tersebut diakibatkan oleh kelalaian korban yang kurang paham akan wilayah kerja. Sehingga diidentifikasi korban tidak menerapkan K3 yang kurang jelas.

Cara mengatasi masalah ini, PT PBM Alam Sejati Semarang perlu meningkatkan upaya untuk mendidik dan menyadarkan karyawan tentang pentingnya penerapan manajemen K3. Hal ini dapat dilakukan melalui program pelatihan yang lebih intensif, kampanye keselamatan kerja, dan komunikasi rutin tentang pentingnya penerapan manajemen K3. Perusahaan juga harus memberikan contoh yang baik dengan selalu menggunakan APD saat berada di lingkungan kerja. Perusahaan juga perlu memperkuat pengawasan dan penegakan kebijakan SMK3. Pengawas harus secara aktif memantau kepatuhan karyawan terhadap penerapan SMK3 dan memberikan teguran atau sanksi yang sesuai bagi mereka yang melanggar peraturan (Setyowati, 2018). Sistem *reward* dan *recognition* juga dapat diterapkan untuk mendorong dan menghargai karyawan yang secara konsisten dalam menerapkan SMK3 (Prabowo, 2020). Penting juga bagi perusahaan untuk melibatkan karyawan dalam diskusi dan pengambilan keputusan terkait keselamatan kerja. Dengan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menyuarakan pendapat dan kekhawatiran mereka, serta terlibat dalam pengembangan dan implementasi kebijakan keselamatan, perusahaan dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab karyawan terhadap keselamatan mereka sendiri dan rekan kerja mereka (Prabowo, 2020).

Menciptakan budaya keselamatan yang kuat adalah proses yang berkelanjutan dan membutuhkan komitmen dari semua tingkatan organisasi. Dengan upaya terus-menerus untuk meningkatkan kesadaran, pelatihan,

pengawasan, dan keterlibatan karyawan, PT PBM Alam Sejati Semarang dapat secara bertahap mengubah perilaku dan sikap karyawan terhadap penggunaan APD dan keselamatan kerja secara keseluruhan. Hal ini pada akhirnya akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, sehat, dan produktif bagi semua karyawan. Berdasarkan uraian dan masalah yang dikemukakan di atas maka dalam penelitian ini penulis tertarik mengambil judul **“ANALISIS PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) TERHADAP KINERJA KESELAMATAN DALAM KEGIATAN BONGKAR MUAT BATU BARA DI PT PBM ALAM SEJATI SEMARANG”**

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya memfokuskan pada karyawan PT PBM Alam Sejati Semarang yang kurang maksimal dalam penerapan alat-alat keselamatan yang mengakibatkan kecelakaan kerja.
2. Data yang diambil berdasarkan periode penulis melaksanakan praktek industri yaitu terhitung dari 01 Agustus 2023 sampai 29 Februari 2024 di PT PBM Alam Sejati Semarang.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kepatuhan terhadap regulasi penerapan SMK3 mampu meningkatkan kinerja keselamatan?
2. Bagaimana tingkat kesadaran di lingkungan kerja mampu meningkatkan kinerja keselamatan?
3. Bagaimana peningkatan budaya keselamatan mampu meningkatkan kinerja keselamatan?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kepatuhan regulasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam meningkatkan kinerja keselamatan di PT PBM Alam Sejati Semarang.

2. Untuk mengidentifikasi tingkat kesadaran di lingkungan kerja dalam meningkatkan kinerja keselamatan di PT PBM Alam Sejati.
3. Untuk mengevaluasi dampak peningkatan budaya keselamatan terhadap peningkatan kinerja keselamatan di PT PBM Alam Sejati Semarang.

1.5 Manfaat penelitian

1. Secara Teoritis

Menambah wawasan penulis tentang ilmu pengetahuan, baik itu fakta, data, maupun peristiwa, serta memberikan pandangan terhadap fakta, data, dan peristiwa tersebut. Hal ini bertujuan agar masyarakat umum memperoleh pengetahuan dan pemahaman baru terkait berbagai aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

2. Secara Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk pengembangan kajian ilmu Transportasi Laut terkait pemahaman mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Hal ini bertujuan untuk memberikan wawasan terkait pentingnya keselamatan di setiap perusahaan.